

**REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
STUDI KASUS POLRES SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**ARIESTA NUR PATRIANA**  
**C100.160.140**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
STUDI KASUS POLRES SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ARIESTA NUR PATRIANA**  
**C100.160.140**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.Hum.)**

**NIK. 290 / NIDN. 0626115901**

**HALAMAN PENGESAHAN**




**REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
STUDI KASUS POLRES SURAKARTA**

Oleh:

**ARIESTA NUR PATRIANA**  
**C100.160.140**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Kamis, Tanggal 24 Desember 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Hartanto, S.H., M. Hum (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M. Hum (  )  
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (  )  
(Anggota 2 Dewan Penguji)

**Dekan,**



**(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)**

NIK. 537/NIDN. 0727085803

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Desember 2020  
Yang membuat Pernyataan



**Ariesta Nur Patriana**

# **REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA STUDI KASUS POLRES SURAKARTA**

## **Abstrak**

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Rekonstruksi menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Rekonstruksi mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi serta menyesuaikan antara keterangan saksi dan tersangka dengan kejadian sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta pelaksanaan dan hambatan rekonstruksi di polres surakarta.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, Rekonstruksi, Penyidikan

## **Abstract**

Reconstruction is one of the methods used in investigations in the investigation process conducted by the police. Reconstruction is one of the tools judges in court. The method used in this research is sociological normative. Reconstruction has an important role in uncovering criminal acts at the Surakarta Police to describe the criminal acts that occurred and adjusting the testimony of witnesses and suspects to the actual events. This study aims to determine the role and implementation and constraints of reconstruction in the Surakarta Police Station used by public prosecutors to prove certain crimes and convince.

**Keywords:** Crime, Reconstruction, Investigation

## **1. PENDAHULUAN**

Banyaknya jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, mendorong aparat penegak hukum untuk menetapkan suatu aturan hukum nasional yang berkaitan dengan aturan hukum pidana. Aturan hukum pidana yang berlaku ada dua macam,

yaaitu aturan pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan hukum khusus yang diatur dalam Undang – Undang Khusus, berdasarkan jenis tindak pidananya.

Polisi sebagai salah satu penegak hukum diharuskan untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkembangan zaman yang terjadi diikuti dengan berkeMzmbangannya juga kejahatan di lingkungan masyarakat, maka dari itu polisi sangat dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran mengenai kejahatan yang telah terjadi. Semakin lama waktu kejahatan berlalu maka semakin sulit pula bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran dibalik kejahatan tersebut. Keadaan yang terjadi sesungguhnya saat kejahatan berlangsung tidak dapat dipastikan oleh penyidik apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan yang sebenarnya, maka acara pidana hanya menunjukkan jalan untuk mendekati dengan kebenaran materiil.

“Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka penyidik menggunakan teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan *fotocopy* adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut”.<sup>1</sup>

Perlu atau tidaknya dilakukan rekonstruksi menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam

---

<sup>1</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 124

pembuktian perkara pidana. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Dalam mengungkap perkara pidana, polisi harus melaksanakan proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Para saksi akan diperiksa satu persatu dan dari keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa tersangka dari suatu tindak pidana. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu jenis tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi dilakukan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana, termasuk para saksi dan korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana atau dengan alasan keamanan rekonstruksi dapat dilakukan ditempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, ternyata rekonstruksi sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini dapat mendukung alat bukti yang lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran rekonstruksi perkara proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta, Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta dan Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan rekonstruksi di Polres Surakarta.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, mendeskripsikan peran Peran rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta, pelaksanaan rekonstruksi perkara di Polres Surakarta dan hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam melaksanakan rekonstruksi.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya dan hakim pidana pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan

dilihat dari sudut teori dan praktek. Serta manfaat praktis yaitu memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan dan peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah Polres Surakarta dan sebagai praktek dalam penelitian hukum dan praktek dalam pembuatan karya ilmiah di bidang hukum.

## **2. METODE**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada peraturan perundang – undangan yang baku. Sedangkan penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengambil data primer, yaitu *observasi* langsung ke tempat penelitian serta wawancara dengan pihak – pihak terkait dengan fokus penelitian mengenai permasalahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat campuran maka selain observasi ke lapangan, penelitian ini juga menggunakan data – data sekunder yaitu data yang berasal dari studi pustaka berupa literatur yang memuat teori – teori dan peraturan hukum yang lainnya serta pendapat para ahli maupun dari bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka di dapat hasil sebagai berikut:

### **3.1 Peran Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polres Surakarta**

Rekonstruksi sangat berperan untuk menggambarkan rangkaian peristiwa utuh yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku. Setelah dilakukan rekonstruksi, akan tergambar jelas jika ada yang belum sempurna dan belum sesuai antara keterangan saksi dan keterangan tersangka. Tujuan diadakan rekonstruksi adalah untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir sehingga tergambar jelas peristiwa yang terjadi sehingga menjadi gambaran bagi penegak hukum guna menentukan siapa tersangkanya dan pasal apa yang digunakan untuk menjerat tersangka.

Sebelum melakukan rekonstruksi, polisi melakukan beberapa hal yang dimulai dari penyelidikan. Polisi mulai melakukan penyelidikan apabila



mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana atau mendapat laporan pengaduan dari masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan maka dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan saksi ahli. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti terkait dengan tindak pidana yang dihadapi penyidik, yang secara jelas akan menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi, salah satunya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi tindak pidana. Pemeriksaan merupakan bagian dari penyidikan, selain untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan saksi, pemeriksaan juga bertujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dan keterangan saksi. Cara yang digunakan polisi untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dan saksi adalah dengan mendeskripsikan tindak pidana yang sebenarnya berdasarkan keterangan tersangka, saksi dan korban jika tidak meninggal dunia.

### **3.2 Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara di Polres Surakarta**

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan polisi dalam penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk memperoleh informasi, kejelasan dan kebenaran tersangka atau saksi serta bukti atau unsur kejahatan yang telah terjadi, untuk memperjelas status atau peran seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut. Rekonstruksi dapat dilakukan di TKP atau di tempat lain yang serupa dengan TKP yang sebenarnya. Dalam melakukan rekonstruksi Polres Surakarta berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 120/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP.

#### **3.2.1 Alur pelaksanaan rekonstruksi**

Setelah mengetahui bahwa peristiwa tersebut diduga atau merupakan tindak pidana, maka penyidikan segera dilakukan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara. Setelah penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya dilakukan pemanggilan tersangka dan saksi. Kemudian melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu bertujuan untuk memperoleh informasi, kejelasan dan kebenaran tersangka atau

saksi serta bukti atau unsur kejahatan yang telah terjadi, sehingga status atau peran seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

#### 3.2.2 Tahapan pelaksanaan rekonstruksi

- a) Menyiapkan peralatan rekonstruksi dan menyiapkan tersangka.
- b) Tersangka melakukan rekonstruksi dengan melakukan beberapa adegan yang dianggap penting dalam proses penyidikan.
- c) Membuat Berita Acara Rekonstruksi memuat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan rekonstruksi.

### **3.3 Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam melaksanakan rekonstruksi**

#### 3.3.1 Hambatan teknis

Polres Surakarta dalam melakukan rekonstruksi tidak begitu banyak mengalami kendala, namun penyidik dihadapi dengan hambatan teknis yang bersifat eksternal pada saat melaksanakan rekonstruksi yaitu sikap tidak kooperatif masyarakat pada saat rekonstruksi di TKP. Masyarakat terutama keluarga korban marah karena tersangka telah melakukan tindak pidana yang merugikan mereka. Karena keluarga korban tidak dapat menerima kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, mereka sering memukul atau melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka yang sedang menjalani rekonstruksi.

#### 3.3.2 Hambatan Yuridis

Walaupun rekonstruksi tidak pernah diatur secara jelas di dalam KUHAP maupun peraturan perundang – undangan lainnya, namun rekonstruksi merupakan implementasi dari Pasal 184 KUHAP tentang adanya bukti petunjuk maka dalam pelaksanaan rekonstruksi ini tidak ditemukan hambatan yuridis. Adanya rekonstruksi ini sebagai upaya penyidik dalam memberikan bukti tambahan berupa bukti petunjuk. Jika bukti lain tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka bukti petunjuk ini diperlukan.

### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta yaitu menggambarkan rangkaian tindak pidana yang terjadi, mendapatkan gambaran

untuk menentukan tersangka dan pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka, mengetahui peran setiap tersangka dalam upaya memperdalam informasi dari tersangka dan untuk melengkapi berkas penyidikan serta menyocokkan antara keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi yaitu hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat. Masyarakat terutama keluarga korban marah karena tersangka telah melakukan tindak pidana yang merugikan mereka. Karena keluarga korban tidak dapat menerima kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, mereka sering memukul atau melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka yang sedang menjalani rekonstruksi. Dalam menghadapi hambatan tersebut penyidik meningkatkan keamanan bagi tersangka pelaku tindak pidana serta TKP dimana rekonstruksi dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamid, Hamrat, dan Harum M. Husein. 1992. *Pembahasan KUHP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.